

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

Diajukan Oleh :
IRMA NIRMALADEWI
45 13 012 012



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Irma Nirmaladewi
Stambuk : 4513012012
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH



Rafiuddin, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

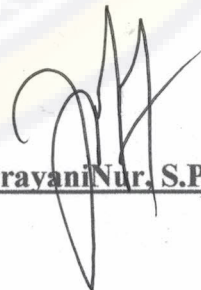
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Manajemen**



Dr. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH



Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan yang terbaik hingga akhir jaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengakui masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan dan hanya atas rahmat dan izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda serta keluarga yang senantiasa memberikan doa, nasehat, dukungan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa selaku pimpinan tertinggi Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada fakultas ekonomi jurusan manajemen.
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dr. H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH. beserta para pembantu dekan lainnya yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas bantuannya.
5. Ibu Indrayani Nur,S.Pd.,SE.,M.Si selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar, yang senantiasa memberikan nasehat kepada penulis.
6. Dr. H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH. selaku pembimbing I dan Rafiuddin,SE.,M.Si selaku pembimbing II senantiasa meluangkan waktu serta berusaha payah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari tahapan persiapan sampai penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen terima kasih atas didikan, ilmu, dan pengetahuan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis selama penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen.

8. Kepada pegawai kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan BAKESBANG POL Kab. Enrekang, BPKD Kab. Enrekang terima kasih telah memberikan izin dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimah kasih kepada kedua Orang Tua Muh.Amir, Hadina yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Terima kasih kepada Saudari Rasmawati Amd.Keb serta Sahabat-sahabatku tercinta Mersi, Ustriaana, Irna, Ani, Tati, Ismi, Putu, Jefri, Syamsir, Dahyar dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat lewat senyum manis dan canda tawa. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. Sukses selalu untuk kalian semua.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan hanya milik Allah Swt, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu karya yang berguna bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2017

Peneliti

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Oleh :

Irma Nirmaladewi
Priodi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Irma Nirmaladewi. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH dan Rafiuddin, SE., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2013-2015 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil analisis mengenai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena masih berada dalam interval 0%-25%, Rasio Efektivitas PAD kinerja keuangan Kabupaten Enrekang berjalan kurang efektif karena rasionya dibawah 100%, sedangkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Enrekang di bawah 100% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

ANALYSIS OF FINANCIAL GOVERNMENTAL PERFORMANCE OF REGENCY OF ENREKANG

By:

*Irma Nirmala Dewi
Prodi Management Faculty of Economics
University of Bosowa Makassar*

ABSTRACT

Irma Nirmaladewi. 2017. Financial Performance Analysis of Local Government of Enrekang Regency (guided by Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH and Rafiuddin, SE., M.Si).

This study aims to analyze the Financial Performance of Regional Government of Pinrang Regency in 2013-2015 seen from the Ratio of Regional Financial Independence, Local Original Revenue Efficiency Ratio, and Regional Finance Efficiency Ratio. This research is a quantitative descriptive research. This research was conducted at Enrekang District Government in Regional Finance Management Board (BPKD). Data collection using documentation method. Data analysis techniques used descriptive quantitative with the formula: Ratio of Regional Financial Independence, Ratio Effectiveness of Original Revenue, and Ratio Efficiency of Regional Finance. The results of the research show that the results of the analysis of the Regional Financial Independence Ratio the relationship pattern is still classified in the pattern of instructive relations because it is still in the interval 0% -25%, Effectiveness Ratio PAD financial performance Enrekang run less effective because the ratio is below 100%, while Ratio Regional Financial Efficiency can be said to be less efficient because the average financial efficiency of Enrekang District is below 100% so that it can be said that the Regional Government still pay less attention to regional development.

Keywords : *Local Government Financial Performance, Local Financial Independence Ratio, PAD Efficiency Ratio, and Regional Finance Efficiency Ratio*

PERNYATAAN KEORSINILIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irma Nirmaladewi

Nim : 4513012012

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Enrekang.

Menyelesaikan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadardan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 4 Agustus 2017

Hormat saya,

Irma Nirmaladewi

DAFTAR ISI

Halaman

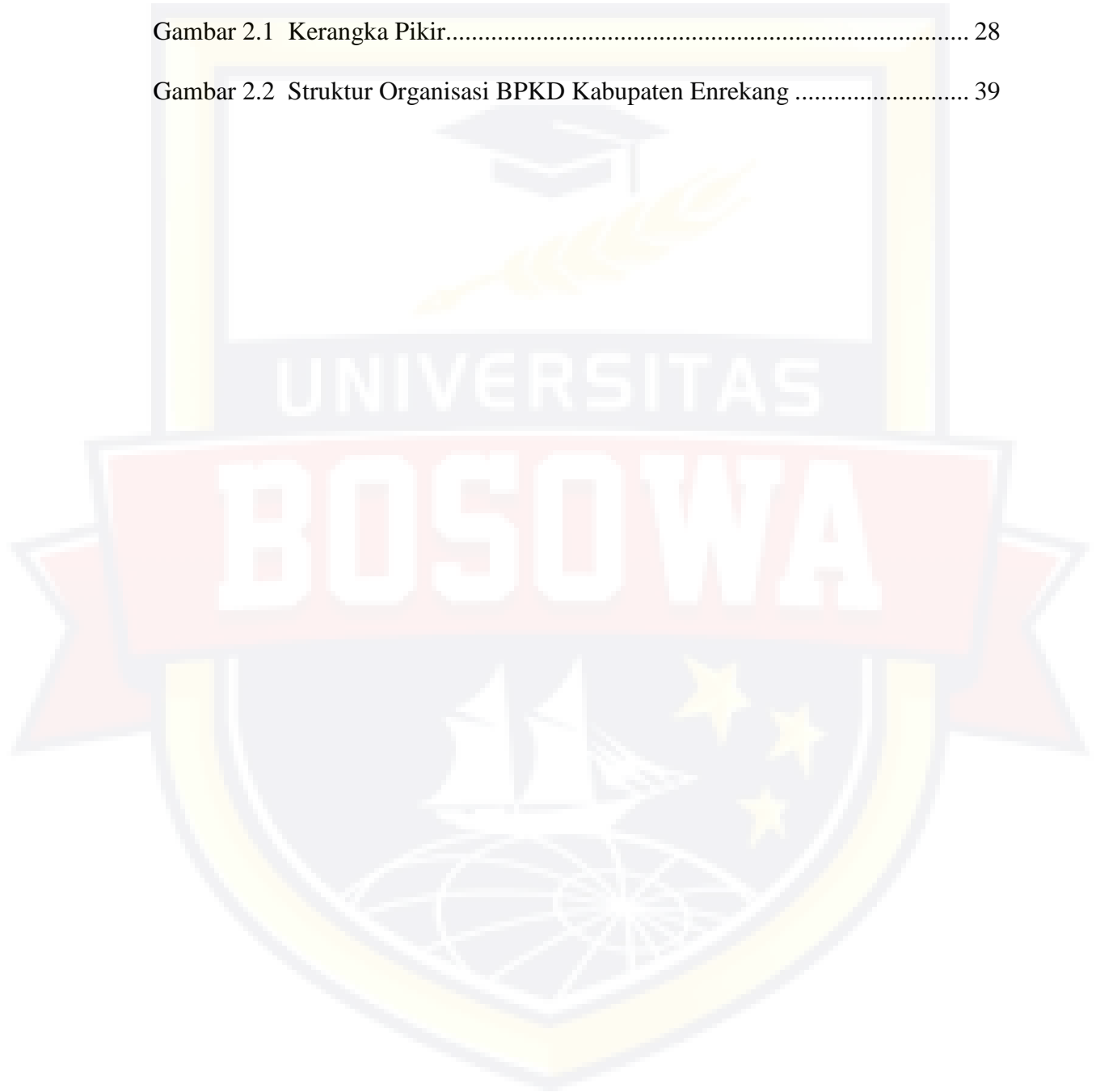
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan.....	8
2.1.2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan.....	8
2.1.3. Pengertian Kinerja Keuangan.....	9
2.1.4. Manfaat Kinerja Keuangan.....	10
2.1.5. Keuangan Daerah	11
2.1.6. Laporan Keuangan Daerah	13
2.1.7. Tujuan Analisis Laporan Keuangan Daerah.....	14
2.1.8. Jenis Rasio berdasarkan data yang bersumber Dari APBD	15
2.1.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
2.2. Kerangka Pikir.....	28
2.3. Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	30
3.2. Metode Pengumpulan Data	30
3.3. Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1. Jenis Data.....	31
3.3.2. Sumber Data	31
3.4. Metode Analisis.....	31
3.5. Definisi Operasional.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum BPKD Kabupaten Enrekang	34
4.1.1 Sejarah Singkat BPKD Kabupaten Enrekang.....	34
4.1.2 Visi Dan Misi BPKD Kabupaten Enrekang	36
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pokok BPKD Kabupaten Enrekang	37
4.1.4 Struktur Organisasi	38
4.2 Data Khusus.....	46
4.2.1 APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2015	46
4.3 Deskriptif Data	47
4.4 Perhitungan Hasil Penelitian	47
4.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	47
4.4.2 Rasio Efektivitas PAD.....	52
4.4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	55
4.5 Pembahasan Hasil Perhitungan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 28

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang 39



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.....	5
Tabel 2.1	Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	16
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi Kerja Keuangan	18
Tabel 4.1	APBD Kabupaten Enrekang	46
Tabel 4.2	Perhitungan Rasio Kemandirian PAD APBD Kabupaten Enrekang.....	49
Tabel 4.3	Perhitungan Rasio Efektivitas PAD APBD Kabupaten Enrekang	54
Tabel 4.4	Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah APBD Kabupaten Enrekang.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga Pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan semata-mata tetapi menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keimanan.

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila Pemerintah Daerah mampu mengolah potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan, maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah

otonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Misi utamanya bukan hanya melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Selain itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut analisis prestasi pengolahan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dimasukkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelolah keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah,

pemerintahan dituntut menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien dan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Penggunaan indikator kinerja ini sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Analisis Keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat *profit oriented*, namun masih jarang yang dilakukan pada lembaga atau organisasi *non-profit oriented* khususnya pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena penyajian

laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan serta sifat dan cakupan yang berbeda.

Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator sebagai berikut : *Input* (masukan) yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. *Output* (keluaran) adalah tolak ukur kerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya yang besar, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang hasil perhitungannya masih mengalami naik turun turun yang berarti tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Enrekang belum stabil. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah yang juga menyebabkan total pendapatan daerah juga berkurang.

Salah satu tujuan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan atau penurunan. Tetapi secara umum, fenomena yang terjadi adalah kinerja keuangan daerah masih belum stabil serta efektif dan efisien.

Dengan adanya otonomi daerah, Kabupaten Enrekang memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi di dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan kepada masyarakat Kabupaten Enrekang sendiri.

TABEL 1.1
APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2013-2015

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pembiayaan (Rp)
2013	637.684.394.059,15	589.006.556.154,00	23.193.332.816,88
2014	737.114.981.212,81	656.765.137.306,00	7.121.563.284,73
2015	919.862.386.647,46	854.981.252.642,00	79.136.281.600,54

Sumber: BPKD Kabupaten Enrekang

Dari tabel diatas dilihat bahwa dari tahun 2013 – 2015 total pendapatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total pendapatan sebesar Rp 637.684.394.059.15. Pada tahun 2014 total pendapatan meningkat sebesar Rp. 737.114.981.212.81, sedangkan pada tahun 2015 total pendapatan meningkat sebesar Rp. 919.862.386.647.46. Untuk APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total belanja sebesar Rp 589.006.556.154.00. Pada tahun 2014 total belanja mengalami peningkatan Rp. 656.765.137.306.00, sedangkan pada tahun 2015 total belanja mengalami peningkatan Rp. 854.981.252.642.00, untuk pembiayaan dapat dilihat dari tahun 2013 sampai 2015 menurun dan meningkat.

Pada tahun 2013 total pembiayaan Rp. 23.193.332.816,88. Pada tahun 2014 total pembiayaan menurun Rp. 7.121.563.284.73, sedangkan pada tahun 2015 total pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 79.136.281.600,54.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang di lihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dalam tahun anggaran 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

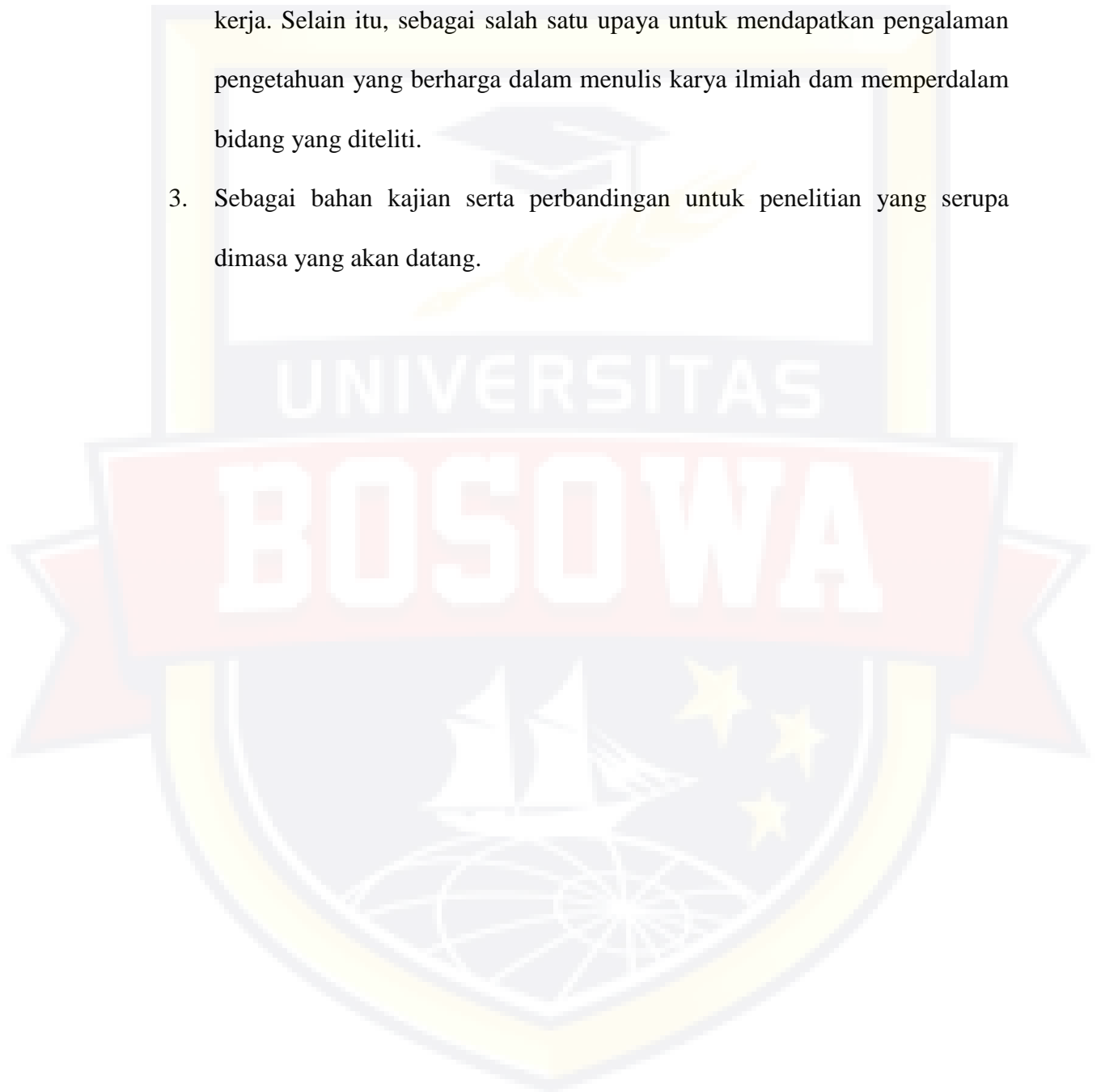
1. Untuk menganalisis tingkat rasio kemandirian kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Untuk menganalisis tingkat rasio efektifitas PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
3. Untuk menganalisis tingkat rasio efisiensi kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penerbit dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam bidang yang diteliti.
3. Sebagai bahan kajian serta perbandingan untuk penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan ,dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya, yang mana penggunaannya harus tepat sasaran,efisien,dan efektif agar tujuan keuangan perusahaan dapat tercapai sesuai rencana.

Manajemen keuangan merupakan salah satu ilmu utama dari manajemen.Manajemen keuangan pada awalnya hanya mengutamakan kegiatan mendapatkan/memperoleh dana saja hingga mencakup kegiatan mendapatkan,penggunaan dana hingga sampai ke pwngelolahan aset (aktiva).

James Van Horne (2012) : Menurut pendapat James Van Horne,bahwa pengertian manajemen keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan perolehan pendanaan serta pengelolaan aset(aktiva)dengan tujuan yang menyeluruh.Suad Husnan: Pengertian manajemen keuangan menurut Suad Husnan adalah manajemen terhadap semua fungsi keuangan.

2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan

Ada terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan :

1. Keputusan investement (*investement decision*)
2. Keputusan pendanaan (*financing decion*)
3. Keputusan pengolaan asset (*assets management decision*)

Fungsi lain manajemen keuangan menurut Harmomo (2011:6) Pertama mencari dana berarti meliputi berbagai kegiatan menemukan, menganalisis serta memutuskan sumber dana mana yang akan di pilih dan di ambil serta berapa jumlahnya. Melalui pelaksanaan fungsi ini akan berbentuk struktur finansial dan struktur modal. Struktur finansial adalah susunan seluruh sumber dana perusahaan (jangka pendek dan jangka panjang) yang tercermin dalam neraca bagian kredit, sedangkan struktur modal adalah susunan sumber dana jangka panjang perusahaan yang terdiri dari hutang jangka panjang dan ekuitas (modal sendiri).

Fungsi kedua menggunakan dana berarti kegiatan merencanakan, menganalisis serta memutuskan aktiva apa yang akan di biyai dan berapa jumlahnya sehingga dapat memberikan peningkatan keuntungan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut munawir (2010:30) telah mendefinisikan pengertian kinerja keuangan perusahaan, yaitu kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjelaskan kegiatan operasionalnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:4) kinerja perusahaan merupakan Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perusahaan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja keuangan bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

2.1.4 Manfaat Kinerja Keuangan

Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.

2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.1.5 Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (Abdul Halim 2010:18-19) Keuangan Daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Lahirnya otonomi daerah telah memberikan keleluasan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Sumber-sumber Penerimaan lainnya.

Untuk itu kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar manajemen

dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah ,pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar manajemen serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui panggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien. Untuk bisa menjelaskan tugas-tugas dan fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
2. Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi:
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatanyang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD).

2.1.6 Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.7 Tujuan Analisis Laporan Keuangan Daerah

Sebuah laporan keuangan memiliki nilai lebih ketika memberikan artian atau gambaran tertentu kepada pihak yang menggunakannya. Karena akan memberikan manfaat yang berbeda untuk setiap penggunaannya, analisi keuangan juga dilakukan dengan tujuan berbeda. Menurut Kasmir (2011:68), tujuan analisis laporan keuangan daerah adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik asset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang dicapai beberapa periode.

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Dengan melakukan analisis laporan keuangan daerah maka informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan.

2.1.8 Jenis Rasio berdasarkan data yang bersumber dari APBD

Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1. Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Widodo dalam (Abdul Halim, 2010 : 262).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio Kemandirian Keuangan Daerah Mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel berikut:

TABEL 2.1

POLA HUBUNGAN DAN TINGKAT KEMAMPUAN DAERAH

Kemampuan Keuangan	Kemandirian(%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% -100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2011:169)

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Abdul Halim, 2010:129-130).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektifitas menurut Mohammad Mahsun, adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu

tidak perlu dilakukan karna meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Raealisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

TABEL 2.2

KRITERIA EFISIENSI KERJA KEUANGAN

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2011:234)

2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintahan Daerah, maka pada era orde baru, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau dengan kata lain adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD adalah suatu anggaran daerah, kedua definisi APBD di atas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber-sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut:

- a. Kelompok pendapatan, meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Jenis pendapatan, misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

- c. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dan jangka pendek dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dapat dirinci menurut:

- a. Organisasi, yaitu suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sekretariat daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya.
- b. Fungsi, misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.
- c. Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan. Definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang rokok. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

Berikut diuraikan kelompok pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri atas jenis pembiayaan berikut:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah seperti penerimaan PAD,

penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

- b. Pencarian dana cadangan merupakan sumber pembiayaan yang dapat berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah atau penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Penerimaan pinjaman daerah merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan meminjam dana termasuk menerbitkan obligasi.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran daerah adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pembiayaan pengeluaran daerah yang terdiri atas jenis pembiayaan berikut:

- a. Pembentukan dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Penyertaan modal (investasi pemerintah daerah) merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).
- c. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menggambarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- d. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menggambarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain.

Sebagai satu kesatuan, dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Dari struktur APBD diatas akan ada kemungkinan surplus atau defisit. Untuk perencanaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja maka dalam proses penyusunannya perlu ada keterlibatan dan keterkaitan antara masyarakat sebagai pemilik (*stakeholder*) dengan DPRD selaku pembawa dan penyalur aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana amanat rakyat. Perencanaan APBD dengan paradigma baru menuntut adanya akuntabilitas publik, yaitu suatu kewajiban pemerintah daerah memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan wakil-wakilnya di DPRD mengenai segala aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik yang telah dipercayakan kepadanya sebagai sesuatu amanat yang harus dilaksanakan.

Dengan perencanaan APBD seperti yang dimaksudkan ini maka peran pemerintah daerah beserta aparturnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bukanlah merupakan slogan kosong belaka seperti yang selama ini kita rasakan. Masyarakat akan semakin terpicu untuk beraktivitas mengembangkan dirinya, daerah dan negaranya, karena mereka merasa ikut terlibat di dalam perencanaan segala aktivitas yang berkaitan dengan mereka, sehingga akan merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil pelaksanaan

aktivitas tersebut, apapun wujudnya, sepanjang di dalam pelaksanaannya tidak menyimpan dari norma-norma aturan yang berlaku.

Dengan model perencanaan seperti ini kita dapat berharap bahwa kerawanan sosial yang diakibatkan oleh kecemburuan sosial karena perasaan adanya perbedaan perlakuan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, akan dapat dihindari atau paling tidak dapat dikurangi. Untuk bisa mewujudkan niat luhur tersebut, diperlukan adanya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja pemerintahan yang merupakan indikator atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat :

1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
2. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesimbangan.

3. Bagian pendapatan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jika strategi dan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah telah disusun dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.

Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut harus disampaikan kembali kepada DPRD jika rancangan APBD yang sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui DPRD, pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah. Dalam perjalanannya APBD yang

disetujui DPRD tersebut di atas dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan (Yani, 2010 : 242):

1. Kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bersifat strategis.
2. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
3. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Dalam pelaksanaan APBD, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa dari penyimpanan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan sebagai pendapatan daerah serta dianggarkan dalam APBD.

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditetapkan dalam lembaran daerah. Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah

ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

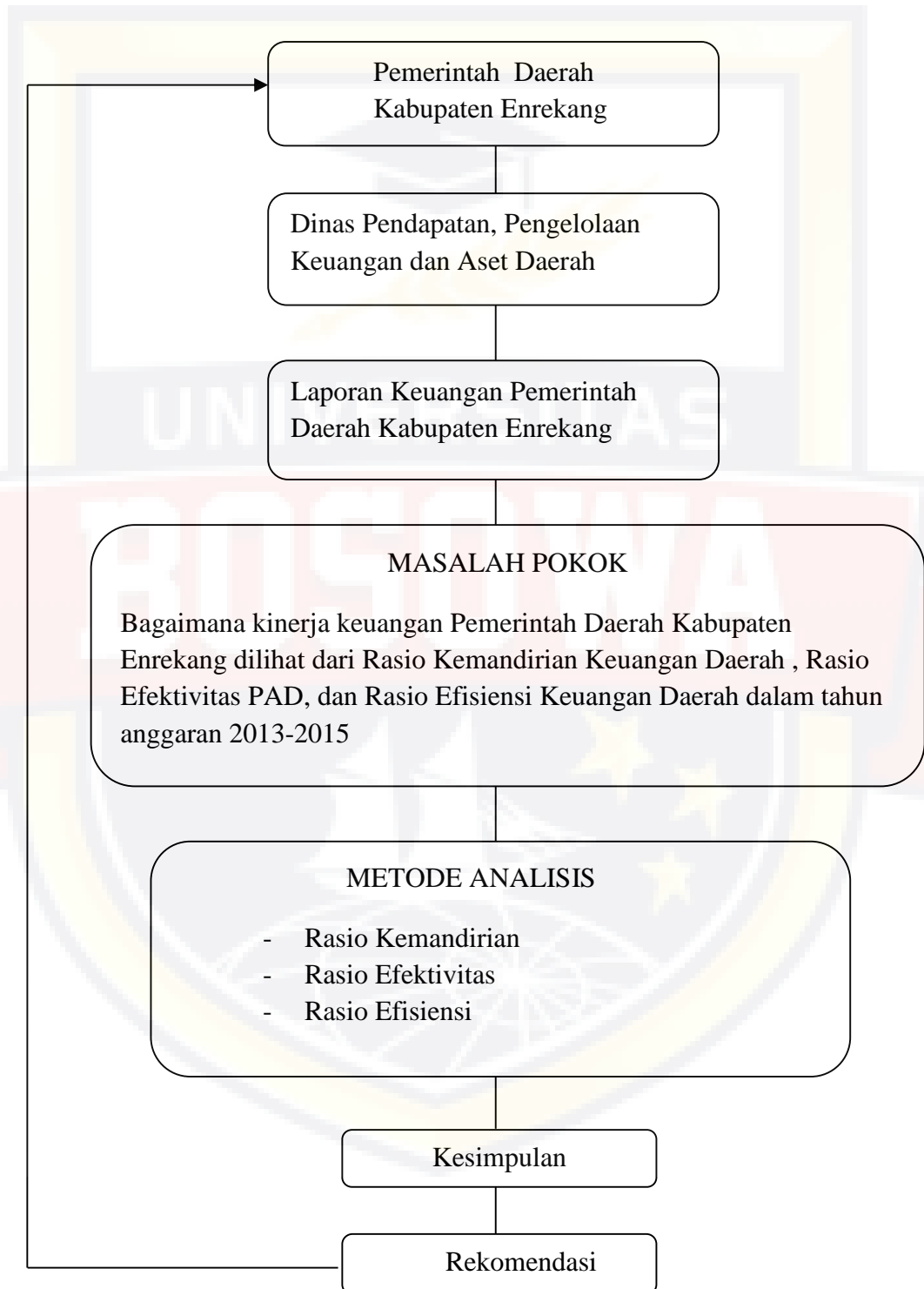
Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran beban APBD.

Pembebanan APBD tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang, dan jasa.

Pengguna anggaran daerah menunjukkan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani APBD dialkukan dengan Surat Perintah Membayar. Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar. Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

2.2 Kerangka Pikir

**GAMBAR 2.1
KERANGKA PIKIR**



2.3 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka diduga bahwa “Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Dalam Tahun Anggaran 2013-2015 belum maksimal”.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Daerah Dan Waktu Penelitian

Penelitian untuk tugas akhir ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Adapun jangka waktu penelitian yang dilakukan \pm 3 bulan yaitu Juni-September 2017.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengutip dari buku-buku yang ada kaitannya dengan variabel yang sedang diteliti oleh penulis.

2) Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan adalah metode yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan cara:

1. Metode Pengamatan (*Observasi*) adalah pengamatan secara langsung dan sistematis dari obyek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Metode Wawancara (*Interview*) adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang bersangkutan.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

1. Data kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data yang non angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan bacaan dan buku-buku, artikel. Data-data ini akan digunakan untuk pengembangan analisis itu sendiri. Pada dasarnya kegunaan data tersebut adalah sebagai dasar objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka memecahkan persoalan yang ada.
2. Data kuantitatif, analisis yang dilakukan terhadap data yang berbentuk angka dan diperoleh dalam bentuk laporan keuangan.

3.3.2. Sumber Data

- 1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung pada Kantor Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- 2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumenserta sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis

$$1. \text{ Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$2. \text{ Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$3. \text{ Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.5. Defenisi Operasional

1. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, menurut Widodo dalam (Abdul Halim, 2010 : 262).

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Abdul Halim, 2010:129-130).

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui

apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu tidak perlu dilakukan karna meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Kabupaten Enrekang

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Kabupaten Enrekang

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan belum begitu kompleks maka bagian keuangan Kabupaten Enrekang yang terdiri dari 4 bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Enrekang, maka melalui peraturan daerah Kabupaten Enrekang, bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan

daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Enrekang berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna yang didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kabupaten Enrekang yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).

Dalam rangka memperlancar Penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang di dukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga Pemerintah Kabupaten Enrekang sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan Pemerintah diperlukan adanya perubahan selain merupakan tuntutan yang mengharuskan pemerintahan yang mengharuskan pemerintahan yang lebih responsive, transparan dan akuntabel, juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika pelayanan publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja pemerintah di daerah.

Salah satu lembaga Pemerintah Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah antara lain adalah Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah

Kabupaten Enrekang yang pembentukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga ini berkedudukan sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Kabupaten Enrekang dituntut adanya Pengelolaan Keuangan Daerah lebih maksimal sehingga diperlukan menyusun rencana strategik dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Enrekang melalui Sekretaris Daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan keputusan Bupati Enrekang.

4.1.2 Visi dan Misi BPKD Kabupaten Enrekang

4.1.2.1 Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang

“ Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparansi, dan akuntabel, untuk gerakan membangun enrekang maju, aman, dan sejahtera”.

4.1.2.2 Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang

Adapun misi dari BPKD Kabupaten Enrekang yaitu :

1. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki

2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar penausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Pokok BPKD Kabupaten Enrekang

4.1.3.1 Tugas Pokok BPKD Kabupaten Enrekang

BPKD Kabupaten Enrekang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.

4.1.3.2 Fungsi BPKD Kabupaten Enrekang

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
4. Pengelolaan administrasi umum keterlaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

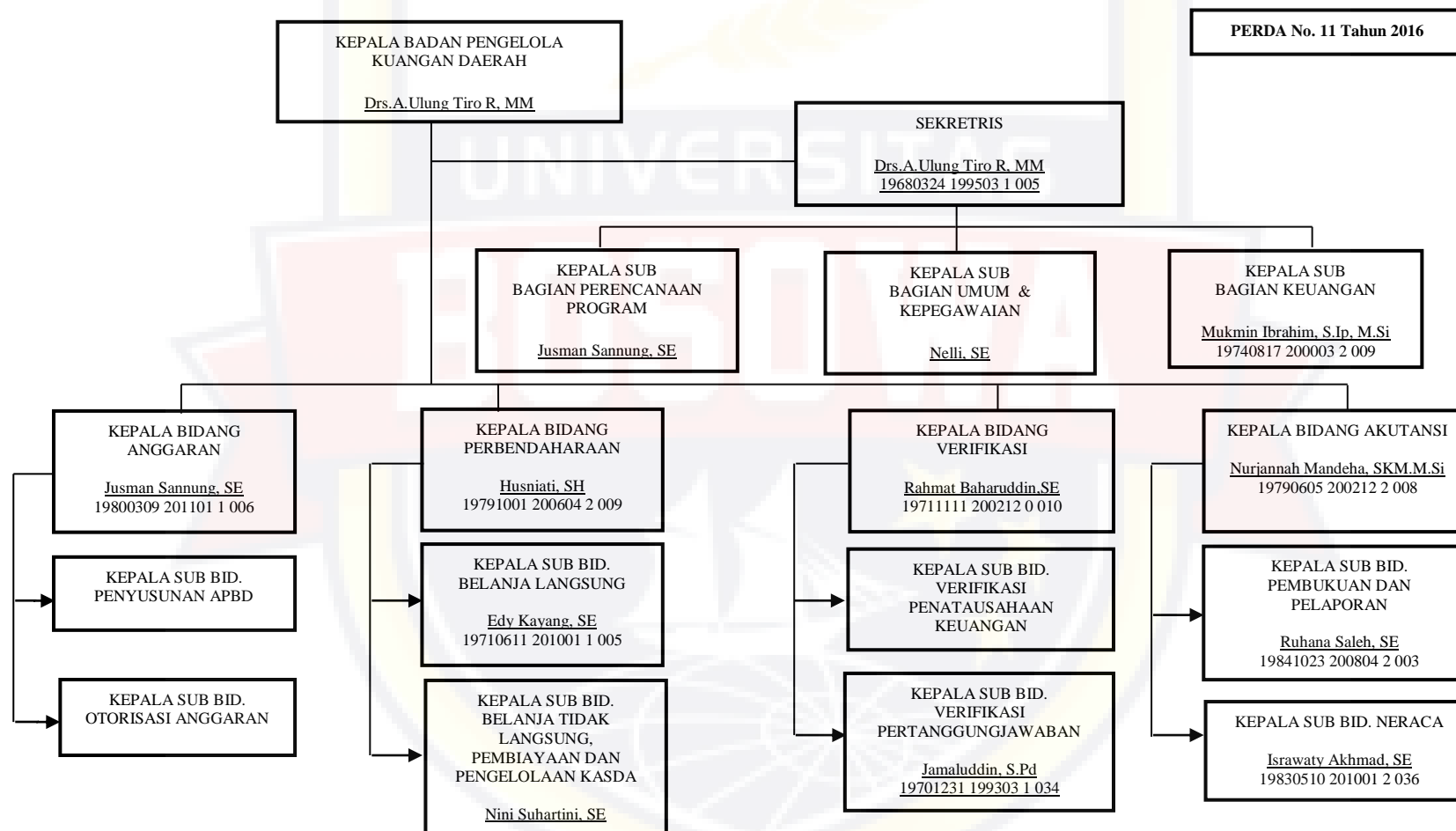
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Struktur Organisasi

Di dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah bentuk struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran tugas operasional perusahaan. Untuk itu perlu adanya pembagian tugas agar setiap bagian dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam bekerja. Di samping itu, perlu juga diciptakan dan dibina kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif.

Struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan adalah struktur organisasi garis atau ini dimana terdapat kerjasama antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat didalam organisasi tersebut. Untuk lebih jelas, akan terlihat pada seksama struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Daerah :

STRUKTUR ORGNISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG



4.1.4.1 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKD Kabupaten Enrekang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKD Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. Pengelolaan keuangan Badan;
- f. Pengelolaan situs web Badan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Sub Bidang Perencanaan

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Daerah dalam melaksanakan analisis perencanaan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi barang dan harga barang.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Bada
- b. Pengelolaan barang/jasa Badan
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan
- e. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian badan dan pelaksanaan
- f. fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan keuangan Badan;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
- b. Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
- c. Sub Bidang Anggaran Belanja.

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan kas daerah;
- b. Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai;
- c. Pengelolaan anggaran PPKD;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Kas Daerah;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai; dan
- c. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD.

7. Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan akuntansi keuangan

daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Akuntansi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4.2 Data Khusus

4.2.1 APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2015

TABEL 4.1

APBD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2013-2015

URAIAN	TAHUN		
	2013	2014	2015
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	Rp 22.091.342.322,00	Rp 34.997.091.444,63	Rp 49.214.800.279,44
Pendapatan transfer	Rp 601.173.734.268,19	Rp 701.511.734.268,18	Rp 864.593.294.839,00
Lain-lain pendapatan yang sah	Rp 11.713.211.111,52	Rp 12.619.631.221,63	Rp 22.928.869.762,77
BELANJA			
Belanja Operasi	Rp 422.142.277.152,00	Rp 525.145.267.452,00	Rp 597.057.089.707,00
Belanja Modal	Rp 112.129.269.112,00	Rp 114.219.392.457,00	Rp 257.924.165.935,00
Belanja tak terduga	Rp 1.105.397.170,00	Rp 1.205.497.250,00	Rp -
Transfer	Rp 14.059.780.147,00	Rp 16.194.980.147,00	Rp 48.128.912.255,00
Pembiayaan			
Penerimaan daerah	Rp 10.275.175,128	Rp 11.375.350.448	Rp 30.093.348,189
Pengeluaran daerah	Rp 8.139.125,310	Rp 9.299.455,410	Rp 7.603.789,505

Sumber data : BPKD Kabupaten Enrekang

4.3 Deskriptif Data

Analisis Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKD Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2013-2015. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKD Kabupaten Enrekang pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Enrekang yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

4.4 Perhitungan Hasil Penelitian

4.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.

a. Tahun 2013

Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang tahun 2013 yaitu:

Tahun 2013

$$\begin{aligned}
 & \text{PAD} \\
 2013 &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \\
 &= \frac{22.091.342.322,00}{601.173.734.268,19} \times 100\% \\
 &= 3,67 \%
 \end{aligned}$$

b. Tahun 2014

Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang tahun 2014 yaitu:

$$\begin{aligned}
 & \text{PAD} \\
 2014 &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \\
 &= \frac{34.997.091.444,63}{701.511.734.268,18} \times 100\% \\
 &= 4,98 \%
 \end{aligned}$$

c. Tahun 2015

Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang tahun 2015 yaitu:

$$\begin{aligned}
 & \text{PAD} \\
 2015 &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{PAD}} \times 100\% \\
 &= \frac{49.214.800.279}{864.593.294.839} \times 100\% \\
 &= 5,69 \%
 \end{aligned}$$

TABEL 4.2
PERHITUNGAN RASIO KEMANDIRIAN PAD APBD
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2013-2015

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pendapatan transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2013	22.091.342.322,00	601.173.734.268,19	3,67	Instruktif
2014	34.997.091.444,63	701.511.734.268,18	4,98	Instruktif
2015	49.214.800.279	864.593.294.839	5,69	Instruktif

Sumber data : BPKD Kabupaten Enrekang

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Enrekang dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 22.091.342.322,00 dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp 34.997.091.444,63 dari

total pendapatan. mengalami peningkatan lagi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 49.214.800.279 dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 601.173.734.268,19 Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 701.511.734.268,18 Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 864.593.294.839. Untuk peningkatan serta pendapatan dari pihak ekstern ini di pengaruhi karna adanya pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2013,2014, dan 2015.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.2 Kemampuan keuangan BPKD Kabupaten Enrekang tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instrukturif dimana peran pemerintah pusat sangat dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Pada tahun 2013 Rasio Kemandirian sebesar 3,67%, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 4,98%. Pada tahun 2015 Rasio Kemandirian sebesar 5,69%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instrukturif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2013 hingga 2015 pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Enrekang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan BPKD Kabupaten Enrekang secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Enrekang sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemampuan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

4.4.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensial riil daerah. Semakin tinggi rasio eektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

a. Tahun 2013

Persentase Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013 yaitu:

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi PAD} \\ 2013 &= \frac{\text{Anggaran PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \\ & \frac{634.124.072.112,00}{642.428.061.092,00} \times 100\% \\ &= 0,98 \% \end{aligned}$$

b. Tahun 2014

Persentase Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2014 yaitu:

Realisasi PAD

$$2014 = \frac{\quad}{\quad} \times 100\%$$

Anggaran PAD

$$\begin{aligned} & 737.114.981.212 \\ = & \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\ & 747.247.016.092 \\ = & 0,98 \% \end{aligned}$$

c. Tahun 2015

Persentase Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang tahun 2015 yaitu:

Realisasi PAD

$$2015 = \frac{\quad}{\quad} \times 100\%$$

Anggaran PAD

$$\begin{aligned} & 919.862.386.647 \\ = & \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\ & 946.648.050.605 \\ = & 0,97 \% \end{aligned}$$

TABEL 4.3
PERHITUNGAN RASIO EFEKTIVITAS PAD APBD
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2013-2015

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kriteria
Anggaran	(Rp)	(Rp)	(%)	
2013	642.428.061.092,00	634.124.072.112,00	0,98	Tidak Efektif
2014	747.247.016.092,00	737.114.981.212,18	0,98	Tidak Efektif
2015	946.648.050.605	919.862.386.647,46	0,97	Tidak Efektif

Sumber data : BPKD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3. Menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Enrekang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PAD dianggarkan sebesar Rp 642.428.061.092,00 dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2014 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 747.247.016.092,00 dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2015 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 946.648.050.605 dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten Enrekang dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 realisasi PAD Kabupaten Enrekang sebesar Rp 634.124.072.112,00 dari total realisasi pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu menjadi 737.114.981.212,18 dari total realisasi pendapatan. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2015 yaitu Rp 919.862.386.647,46 dari total realisasi pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKD Kabupaten Enrekang pada tahun 2013 sebesar 0,98%, tahun 2014 sebesar 0,98%, dan tahun 2015 sebesar 0,97%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Enrekang untuk tahun 2013 dan 2015 berjalan tidak Efektif karena rasio efektivitas yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Untuk tahun 2013 dan 2015 belum efektivitasnya masih dibawah 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 4.3. Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang dari tahun 2013 – 2015 sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% . Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Enrekang juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

4.4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

a. Tahun 2013

Persentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013 yaitu:

Realisasi Belanja Daerah

$$2013 = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Daerah

712.128.126.117

$$= \frac{712.128.126.117}{735.172.218.112} \times 100\%$$

735.172.218.112

$$= 0,96 \%$$

b. Tahun 2014

Persentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang tahun 2014 yaitu:

Realisasi Belanja Daerah

$$2014 = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Daerah

713.111.116.112

$$= \frac{713.111.116.112}{745.162.219.113} \times 100\%$$

745.162.219.113

$$= 0,95 \%$$

c. Tahun 2015

Persentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang tahun 2015 yaitu:

Realisasi Belanja Daerah

$$2015 = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Daerah

$$= \frac{728.128.162.114}{755.725.619.113} \times 100\%$$

$$= 0,96 \%$$

TABEL 4.4
PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI KEUANGAN DAERAH APBD
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2013-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2013	712.128.126.117	735.172.218.112	0,96	Kurang Efisien
2014	713.111.116.112	745.162.219.113	0,95	Kurang Efisien
2015	728.128.162.114	755.725.619.113	0,96	Kurang Efisien

Sumber data : BPKD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4. Diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 belanja daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 712.128.126.117 naik pada tahun 2014 menjadi Rp 713.111.116.112. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 tetap naik menjadi Rp. 728.128.162.114. Total pendapatan daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2013 sampai tahun 2015 juga selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2013 total pendapatan daerah sebesar Rp 735.172.218.112. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 745.162.219.113, kemudian tahun berikutnya tahun 2015 naik sebesar 755.725.619.113. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4. Juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun

2013 sampai tahun 2015 dapat dikatakan Kurang Efisien. Hal ini disebabkan karena selisi total belanja dengan total pendapatan sangat beda tipis.

4.5 Pembahasan Hasil Perhitungan

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2013 hingga 2015 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Enrekang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan BPKD Kabupaten Enrekang secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Enrekang sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 4.3. Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang dari tahun 2013 – 2015 sudah Efektif karena rata-

rata efektivitasnya di atas 100% . Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Enrekang juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4. Juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dikatakan Kurang Efisien. Hal ini disebabkan karena selisih total belanja dengan total pendapatan sangat berbeda tipis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif.
2. Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan BPKD Kabupaten Enrekang tahun 2013,2014 dan 2015 berjalan tidak efektif.
3. Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dikatakan Kurang Efisien.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintahan Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan

pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Dengan adanya program peningkatan PAD, pemerintahan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintahan pusat.

2. Pemerintahan Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintahan Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.
3. Untuk mengefisienkan keuangan daerah pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah agar tidak terjadi defisit pada keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim.2010.*Akuntansi Daerah Sektor Publik* : Jakarta, Salemba 4.

Bastian, Indra.2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*.
Jakarta, Erlangga.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2010. *Analisis Laporan Keuangan. Jakarta* :
Bumi Aksara

Irham Fahmi.2011. *Analisis Kinerja Keuangan. Bandung* : Alfabeta

James C van Horne dan john m. wachowicz jr. 2012. *Manajemen
Keuangan*.jakarta : Salemba Empat

Kasmir.2016.*Analisis Laporan Keuangan.jakarta*: PT Grafindo Persada

Kusnadi. 2010.*Akuntansi Pemerintahan (publik)*. Bandung : UNIBRAW malang

Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:
Penerbit Andi.

Munawir.2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty

Mohammad Mahsun. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :
BPFE.

Sitanggang. 2012 *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Asli, penerbit: Mitra
Wacana Media, Jakarta.

Sofian Syafri Harahap. 2011.*Teori Akuntansi Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Yani, Achmad, 2010, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, edisi kesatu, cetakan kedua, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta.

